PWNU Jatim Menegaskan Tak Akan Membiarkan Indonesia Dipimpin Islam Garis Keras

written by Harakatuna

Harakatuna.com. Surabaya- Banyak pihak menilai pilpres 2019 bukan hanya soal pertarungan memperebutkan jabatan presiden dan wakil presiden, akan tetapi lebih dari itu yakni pertarungan pengaruh antara kelompok garis halus yang menjunjung nilai-nilai keberagaman dengan kelompok garis keras.

#2019GantiPresiden merupakan gerakan yang dibentuk oleh oposisi dengan dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang selama ini memusuhi pemerintah.

#2019GantiPresiden di Surabaya, Ada Nama Abu Jibril Terdakwa Kasus Terorisme

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, berada di balik gerakan ini, selain ormas semacam Front Pembela Islam (FPI) yang kita semua sudah tahu bagaimana ormas ini melakukan dakwah.

Untuk itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menegaskan tak akan membiarkan kelompok garis keras menguasai kepemimpinan Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan majunya Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi merupakan amanat kader NU dalam menjaga Islam moderat dan Islam ala Ahlissunnah wal Jamaah.

"Jadi beliau mau karena untuk menjaga keutuhan daripada ribut-ribut. Lalu beliau mengatakan juga amanat kepada kader NU itu menjaga ajaran Islam Ahlissunnah yang moderat dan menjaga keutuhan NKRI," ujar Kiai Marzuki.

Selain itu, Kiai Marzuki juga mengatakan warga NU jangan sampai mempunyai pemikiran bodoh yang menganggap majunya kiai Ma'ruf menyalahi khittah atau alasan apapun yang dihembuskan lawan politik beliau sementara disisi lain negara terancam dikuasai kelompok garis keras.

“Sangat bodoh sekali jika ada orang yang berbeda alasan khittah atau alasan apa, lalu membiarkan negara dikuasai oleh aliran keras atau membiarkan negara dikuasai, didanai asing atau negara dikuasai oleh kelompok Islam yang menentang Ahlussunnah Wal Jamaah, atau membiarkan negara dipimpin oleh orang yang mengancam keutuhan bangsa,” katanya.

Kiai Marzuki melanjutkan, NU secara organisasi memang tak boleh terlibat dalam politik praktis, namun belakangan ini para kiai membaca gelagat politik yang tidak baik di Indonesia.

Kelompok yang selama ini kerap menebarkan kebencian dan mengandalkan kekerasan dalam berdakwah bahkan ada yang ingin mengganti sistim negara, bersatu mendukung salah satu pasangan calon capres-cawapres. Kalau kondisi ini dibiarkan maka akan mengancam Islam Ahlissunnah wal Jamaah dan NKRI.

“Sampai ini kiai-kiai akan membaca ada gelagat, ada indikasi, entah orangnya atau pendukungnya atau penyandang dananya, dikhawatirkan bisa mengancam Islam moderat, bisa mengancam Islam Ahlussunnah Wal Jamaah atau sedikit mengancam NKRI, atau makin dekat dengan gerakan asing,” paparnya.

Kiai Marzuki mengatakan, keterlibatan para kiai dalam politik bukan ambisi pribadi tapi semata-mata panggilan untuk menyelamatkan NKRI dan paham yang dibawa NU.

“Jika ada dari kader NU yang mendapat amanah menjaga NKRI dan menjaga Islam moderat harus mau berperan di sektor apapun, harus mau berperan di tingkat apapun. Ini bukan ambisi politik pribadi, tapi memang panggilan misi yang dibawa NU menjaga Ahlussunnah dan NKRI,” pungkasnya.